

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Kerja sama antara Indonesia dan Thailand dalam kerangka *ASEAN Integrated Food Security* (AIFS) merupakan manifestasi nyata dari upaya kolektif regional dalam memperkuat ketahanan pangan di Asia Tenggara. Sebagai dua negara kunci dalam produksi dan konsumsi beras di kawasan, hubungan bilateral Indonesia–Thailand memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas pasokan pangan regional. Thailand sebagai eksportir utama dan Indonesia sebagai salah satu importir terbesar menjadikan kerja sama ini berorientasi pada saling ketergantungan dan stabilisasi pasokan, terutama dalam kondisi darurat pangan.

Melalui kerangka AIFS dan *Strategic Plan of Action on Food Security* (SPA-FS), Indonesia dan Thailand aktif berpartisipasi dalam berbagai program seperti *ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve* (APTERR), harmonisasi standar pangan, pertukaran informasi pasar, serta peningkatan produksi berbasis keberlanjutan. Kerja sama ini memperlihatkan bentuk nyata interdependensi dalam hubungan internasional, sekaligus menjadi contoh penerapan prinsip kerja sama internasional yang lebih mengedepankan konsensus, fleksibilitas, dan kedaulatan nasional.

Namun, kerja sama ini masih menghadapi sejumlah tantangan, antara lain perbedaan kapasitas teknologi pertanian, kesenjangan infrastruktur, dan kepentingan nasional masing-masing negara yang kadang bersifat proteksionis. Meskipun demikian, hubungan bilateral Indonesia–Thailand tetap menjadi pilar penting dalam mendukung tujuan AIFS, baik dalam peningkatan ketersediaan pangan, efisiensi distribusi, maupun stabilitas harga di tingkat regional.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *ASEAN Integrated Food Security* (AIFS) *Framework* merupakan bentuk kerja sama regional yang strategis dan komprehensif untuk menjawab tantangan ketahanan pangan di kawasan Asia Tenggara. AIFS menjadi manifestasi dari kesadaran kolektif negara-negara anggota ASEAN terhadap pentingnya kolaborasi dalam menghadapi krisis pangan global, perubahan iklim, fluktuasi harga, serta ketergantungan impor. Kerangka ini berhasil menyatukan

kepentingan negara-negara ASEAN melalui prinsip interdependensi, fleksibilitas, dan konsensus yang dikenal sebagai ASEAN Way.

6.2 Saran

1. Penguatan Komunikasi dan Koordinasi Bilateral

Indonesia dan Thailand perlu meningkatkan forum dialog teknis dan diplomatik secara berkala untuk memastikan koordinasi dalam kebijakan ekspor-impor pangan, terutama dalam kondisi krisis. Hal ini penting agar tidak terjadi kejutan pasar akibat larangan ekspor sepihak yang berisiko mengganggu ketahanan pangan di Indonesia.

2. Peningkatan Kolaborasi Riset dan Transfer Teknologi

Kerja sama harus diperluas pada sektor riset pertanian, seperti pengembangan varietas padi tahan iklim ekstrim dan efisiensi irigasi. Indonesia dapat memanfaatkan kemajuan teknologi pertanian Thailand melalui program pertukaran peneliti dan pilot project di kawasan produksi utama.

3. Pembentukan Mekanisme Respons Darurat Bilateral

Di luar APTERR, Indonesia dan Thailand dapat mengembangkan skema cadangan beras bilateral atau sistem barter pangan berbasis kebutuhan darurat, guna mempercepat distribusi bantuan saat terjadi bencana alam atau kelangkaan.

4. Harmonisasi Standar dan Sertifikasi Produk Pertanian

Kedua negara dapat menyusun kesepakatan teknis bilateral dalam harmonisasi standar mutu dan keamanan pangan untuk mempercepat arus perdagangan produk agrikultur tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan.

5. Pemberdayaan Petani Melalui Program Bersama

Program kerja sama yang melibatkan kelompok tani dan koperasi di kedua negara perlu diperluas, misalnya melalui pelatihan bersama, akses pasar lintas negara, atau pendampingan usaha mikro di sektor pertanian yang mendukung ekspor produk pertanian bernilai tambah.

6. Peningkatan Kerja Sama di bidang Ekspor-Import Pangan

Kerja sama Indonesia–Thailand dalam ekspor-import pangan perlu diperkuat melalui perjanjian bilateral yang lebih terstruktur dan responsif terhadap dinamika krisis pangan global. Sebagai produsen dan eksportir beras utama, Thailand memiliki posisi strategis dalam memasok kebutuhan pangan Indonesia yang masih menghadapi kendala produksi domestik dan distribusi logistik.

7. Perluasan Tarif Non-AFTA dan Early Harvest Program

Perluasan kerja sama tarif diluar skema AFTA menjadi langkah strategis dalam meningkatkan arus perdagangan pangan antar kedua negara. Skema *Early Harvest Program* dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi akses pasar terhadap komoditas pangan tertentu dengan menghapus atau menurunkan tarif sebelum FTA secara penuh diberlakukan. Program ini dapat difokuskan pada komoditas yang paling terdampak krisis iklim atau tergolong pangan pokok, seperti beras, jagung, dan gula.

8. Implementasi AIFS yang Lebih Inklusif secara Kelembagaan

Agar AIFS dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan desain kelembagaan yang lebih inklusif dan representatif. Indonesia dan Thailand dapat mendorong pembentukan *ASEAN Food Security Coordinating Council* yang melibatkan perwakilan dari petani, koperasi, LSM, sektor swasta, serta pemerintah daerah. Hal ini penting agar kebijakan yang disusun tidak bersifat top-down semata, melainkan partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

9. Pembentukan Lumbung Pangan Regional

Pembentukan Lumbung Pangan Regional (*Regional Food Reserve*) antara Indonesia dan Thailand dapat menjadi mekanisme mitigasi krisis pangan yang lebih konkret. Meskipun ASEAN telah memiliki APTERR, cadangan ini masih terbatas dalam kapasitas maupun mekanisme distribusinya. Oleh karena itu, Indonesia dan Thailand dapat menginisiasi penyimpanan gabah atau beras dalam jumlah tertentu di lokasi strategis (misalnya di Sumatera atau Thailand Selatan) yang dapat diakses saat

terjadi bencana atau lonjakan harga.